



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IVAND ADILYAN ANUGRAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3. NHK : 439320

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.620.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 775.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XMAX 250 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOBIL, CHEVROLET TRAX14TURBOPRE4X2AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA D1BO2N26L2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ TRD 2.4 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 119.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 350.345.082

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.364.845.082

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.364.845.082

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.